

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Krisis finansial yang melanda Indonesia pada tahun 1997 - 1998 juga merupakan salah satu dampak dari maraknya kasus *fraud*. *Fraud* adalah permasalahan krusial yang dihadapi dunia, dan dapat dikatakan *fraud* merupakan *silent killer* bagi perusahaan. *Fraud* tampil dengan beberapa modus dapat terjadi dimanapun dan diperusahaan apapun baik diperusahaan skala kecil maupun perusahaan yang telah *go public*, tentunya juga disektor pemerintah atau organisasi publik.

Pada masa lalu *fraud* cenderung bersifat tradisional, dimana pelaku dan korban bertemu secara fisik dan kebanyakan dilakukan pada sektor perdagangan, sedangkan pada masa kini *fraud* dilakukan dengan menggunakan teknologi. Chris Mathers (dalam Gugus dan Nurlita, 2019:5) mengatakan bahwa sejatinya tidak ada *fraud* yang baru, yang ada hanyalah cara baru untuk melakukannya, dan cara baru tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE:2020) juga berpendapat bahwasannya teknologi berperan penting dalam maraknya tindakan *fraud*, teknologi juga membuat tindakan *fraud* menjadi bervariasi dan tidak mengenal batas negara. Hasil penelitian *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE:2020) menunjukkan bahwa setiap tahun rata-rata 5% pendapatan organisasi menjadi korban *fraud*.

Dalam publikasinya dengan judul “*Report to the nation (RTTN) ACFE*” tahun 2020 dikatakan bahwa berdasarkan Global Fraud Survei, *fraud* terjadi sebanyak 2504 kasus pada 125 negara dengan kerugian rata-rata mencapai US\$ 3,6 milyar dan berlangsung selama lebih dari 14 bulan sebelum terdeteksi. ACFE mengungkapkan ada 3 kategori dalam kecurangan yang terjadi yakni penyalahgunaan aktiva (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*) dan kecurangan pada pelaporan keuangan (*financial statement fraud*).

Kasus penyalahgunaan asset merupakan jenis *fraud* yang paling sering terjadi dengan presentase sebesar 86 % dan rata-rata kerugian sebesar \$100.000, Korupsi dengan presentase sebesar 43% dan rata-rata kerugian \$200.000, sementara kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan hanya sebesar 10% namun kerugian yang ditimbulkan cukup besar yakni \$954.000. Subagio Tjahjono, dkk (2013;3) berpendapat fraud laporan keuangan menimbulkan kerugian yang lebih besar dari jenis fraud lainnya karena dilakukan oleh *top level* manajemen sehingga lebih sulit untuk terdeteksi.

Sejatinya laporan keuangan merupakan tolak ukur dari efisiensi dan efektifitas kinerja perusahaan, juga merupakan perangkat komunikasi antara manajemen dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan yang berkepentingan . Oleh karenanya laporan keuangan harus mengandung informasi yang relevan, handal, lengkap, mudah dipahami, tepat waktu dan dapat diakses dan dapat diverifikasi (Romanaey dan Steinbart:2012). Laporan keuangan yang tidak disajikan secara benar dapat menciptakan permasalahan yang serius bagi perusahaan dan tentunya merugikan *stakeholder*. Prilaku kecurangan atas laporan

keuangan mencakup perbuatan kesalahan yang disengaja atas nilai keuangan tertentu untuk menghasilkan suatu tampilan keuntungan yang lebih baik guna mengelabui pemegang saham maupun kreditor (Nurharyanto, 2011).

Fraud dalam pelaporan keuangan tentunya bukan fenomena baru. Salah satu kasus kecurangan pelaporan keuangan yang terkenal di dunia adalah kasus kecurangan pelaporan keuangan yang menimpa perusahaan energi asal Amerika Serikat yaitu Enron Corporation. Enron merupakan perusahaan hasil *marger* antara InterNorth (penyalur gas alam melalui pipa) dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti dari Enron adalah industri energi, yang kemudian melakukan diversifikasi usaha meliputi future transaction, trading commodity non-energy dan kegiatan bisnis keuangan.

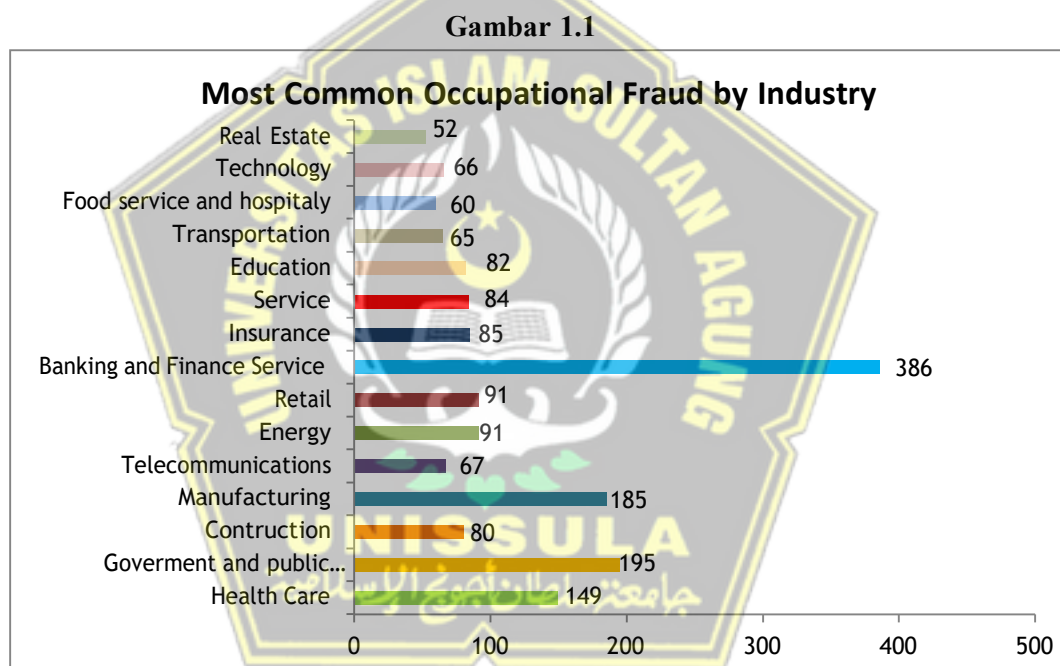
Kasus Enron mulai terungkap pada Desember 2001 dan berlangsung hingga tahun 2002. Kasus ini berdampak pada bursa keuangan global, dimana terjadi penurunan tajam harga saham pada berbagai bursa di dunia, mulai dari Asia, Amerika, dan Eropa. Enron merupakan perusahaan yang menduduki peringkat 7 perusahaan teratas di Amerika Serikat yang kemudian bangkrut dengan meninggalkan hutang sebesar US\$31.2 Miliar. Pihak manajemen Enron ditemukan melakukan moral *hazard* dengan manipulasi laporan keuangan melalui akun pendapatan. Enron mempublikasikan keuntungan US\$600 juta, dan menutupi hutang sebesar US\$1.2 Miliar. Kasus kemudian diperkeruh dengan tidak adanya independensi audit dari pihak KAP Arthur Andersen.

Selain kasus Enron, kasus kecurangan pelaporan keuangan juga menyerang perusahaan teknologi asal Jepang yang sudah hampir 140 tahun

beroperasi yakni Toshiba. Pada Mei 2015, Toshiba secara mengejutkan mengumumkan bahwa perusahaannya sedang melakukan investigasi internal dan pihaknya harus melakukan revisi atas laporan keuangan 3 tahun terakhir. Setelah dilakukan investigasi menyeluruh diketahui bahwa pihak manajemen Toshiba terbukti melakukan penggelembungan laba sebesar 151,8 milyar yen (atau US\$1,22 milyar) dalam 5 tahun. Kasus fraud yang menimpa Toshiba menyebabkan CEO Toshiba, Hisao Tanaka dan delapan pimpinan lainnya mengundurkan diri.

Kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 2001 publik Indonesia dikejutkan dengan temuan Kementerian BUMN dan Bapeppam yang menemukan adanya salah saji (*overstatement*) pada Laporan Keuangan PT. Kimia Farma untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 yang telah audit oleh KAP Hans Tuanakotta & Mustofa. PT. Kimia Farma melaporkan laba bersih sebesar Rp. 32 milyar akan tetapi Kementerian BUMN dan Bapeppam menilai nilai laba bersih tersebut terlalu tinggi dan mengandung unsur rekayasa. Kemudian Bapeppam melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan Bapeppam ditemukan salah saji (*overstatement*) pada akun penjualan dan persediaan di 3 (tiga) unit usaha yang dilakukan dengan menggembungkan harga persediaan (Bapeppam, 2001). Selain itu PT Kimia Farma juga melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 (dua) unit usaha. Dari kasus PT. Kimia Farma dapat diketahui bahwa perusahaan menggunakan ROA sebagai “alat” untuk memanipulasi laporan keuangan (Martantya, 2013).

Kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan tidak hanya menimpa perusahaan manufaktur. Survey yang dilakukan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2020 menunjukkan bahwa sektor keuangan dan perbankan justru merupakan sektor yang paling banyak terjadi kasus *fraud*. Berdasarkan penelitian ACFE 386 kasus *fraud* terjadi di industri sektor keuangan. Perbandingan dengan sektor lain yang mengalami kasus *fraud* dapat dilihat lebih lanjut pada gambar 1.1.



Sumber : *Association of Certified Fraud Examiners* (2020)

Fraud yang menimpa industri perbankan dan jasa keuangan di Indonesia diantaranya begitu fenomenal, bahkan hingga saat ini beberapa kasus belum terselesaikan. Tahun 2011 kasus *fraud* terjadi pada Citibank, *fraud* dilakukan oleh mantan *Relationship Manager* Citibank atas nama Malinda Dee. Malinda Dee kemudian di dakwa melakukan tindak pencucian uang dan penyelewengan dana nasabah dengan nominal Rp. 27,36 milyar dan transaksi dalam dollar

Amerika Serikat senilai US\$2.08 juta. Malida Dee dengan bantuan seorang *teller* melakukan pemindah bukuan dan pentransferan dana ke rekening pribadi miliknya tanpa izin dari nasabah yang bersangkutan.

Selain Citibank, kasus *fraud* juga terjadi di Bank Century, kasus ini bahkan turut menyeret beberapa nama eksekutif Indonesia dan diperkirakan merugikan negara lebih dari Rp 7 Triliun. Kasus yang terjadi di Bank Century ini bermula ketika terjadi kegagalan kliring pada 19 November 2008.

Lembaga pembiayaan juga merupakan sektor yang rentan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Tahun 2019 perusahaan pembiayaan yaitu PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang merupakan anak perusahaan Columbia Grup menjadi sorotan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah kupon Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan SNP Finance mengalami kegagalan bayar. SNP Finance melakukan pengajuan modal kredit kepada 14 bank namun terjadi kredit macet. Berdasarkan pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri diketahui SNP melakukan pemalsuan dokumen, menggandakan, menambahkan dan menggunakan daftar piutang fiktif. Laporan Keuangan milik SNP Finance diketahui telah diaudit oleh Deloitte Indonesia yakni KAP Satrio Bing Eny & Rekan namun auditor tidak menemukan adanya kecurangan. Pihak Deloitte mengklaim sudah melakukan audit berdasarkan standar audit yang diterapkan Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Baru-baru ini dikisaran awal tahun 2020 publik digemparkan dengan kasus gagal bayar hingga dugaan korupsi pada perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia, yang tidak lain merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni

PT. Asuransi Jiwasraya Tbk. Pada November tahun 2019 Kementrian BUMN telah melaporkan indikasi kecurangan di PT. Asuransi Jiwasraya Tbk, kepada Kejaksaan Agung. Kementrian BUMN menduga kegagalan bayar atas klaim asuransi PT. Asuransi Jiwasraya Tbk, diakibatkan adanya investasi pada saham lapis ketiga dan instrumen reksa dana tunggal yang diduga tidak sesuai kaidah serta standar profesional pelaku investasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian mengumumkan pernyataan resmi terkait audit yang telah dilakukan pihaknya, dalam rilisnya BPK menyatakan bahwa laba PT. Asuransi Jiwasraya Tbk sejak 2006 adalah laba yang semu karena sudah dilakukan rekayasa pada laporan keuangan perseroan. Kasus dugaan korupsi dan rekayasa laporan keuangan pada PT. Asuransi Jiwasraya Tbk, ditaksir telah merugikan negara hingga Rp,16 Triliun.

Maraknya kasus *financial statment fraud* menuntut auditor untuk lebih berperan dalam mendeteksi terjadinya kecurangan sedini mungkin, agar tidak menimbulkan dampak yang serius. Auditor dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya *fraud* dengan menggunakan berbagai prespektif untuk mempertimbangkan adanya potensi terjadinya kecurangan. Beberapa teori dapat digunakan oleh auditor untuk mendeteksi terjadinya *fraud* mulai dari *fraud triangle theory*, *fraud diamond theory*, hingga teori fraud terbaru yaitu *fraud pentagon theory*.

Fraud triangle thoery atau teori segitiga fraud adalah teori yang dicetuskan oleh Cressey (1953). Cressey (1953) berpendapat bahwa *Fraud* selalu diikuti oleh 3 faktor yaitu tekanan (*preassure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi

(*razionalization*). Seiring dengan perkembangan zaman, teori segitiga fraud Cressey juga turut mengalami perkembangan. Pada 2004 Wolfe dan Hermanson mengemukakan *fraud diamond theory* sebagai perkembangan *fraud triangle theory* yang dikemukakan Cressey (1953). Teori *fraud diamond* menambahkan satu elemen yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* yakni kompetensi (*Capability*).

Kemudian Crowe (2011) juga turut menyempurnakan teori yang dicetuskan Cressey. Dalam penelitian yang dilakukan Crowe ditemukan bahwa elemen arogansi (*arrogance*) juga turut berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*. Penelitian yang dikemukakan oleh Crowe ini juga memuat elemen *fraud triangle theory* dan elemen *fraud diamond theory* yaitu kompetensi (*competance*). Jadi *fraud* model yang dicetuskan oleh Crowe terdiri dari 5 (lima) elemen yaitu tekanan (*preassure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rasionalization*), kompetensi (*competence*), dan arogansi (*arrogance*). Perkembangan model *fraud* terbaru ini dikenal dengan *The Crowe's Fraud Pentagon Theory*.

Penelitian ini menerapkan *The Crowe's Fraud Pentagon Theory*, karena merupakan teori terbaru yang menyempurnakan teori *fraud triangle* dan teori *fraud diamond* untuk melakukan deteksi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Adanya *conflic of interest* antara manajemen perusahaan dengan investor seringkali memicu manajemen mengambil jalan pintas dengan melakukan “modifikasi” laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian mengenai kemampuan perkembangan model *fraud* terbaru, *The*

Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam mendeteksi *financial statment fraud* pada lembaga keuangan non perbankan di Indonesia.

Beberapa penelitian mengenai *financial statment fraud* sudah banyak dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketiga teori tersebut guna mendeteksi terjadinya kecurangan, namun terdapat perbedaan hasil penelitian antar penelitian yang satu dengan lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel *pressure* yang diproksikan dengan *financial stability*, dan *financial target*. *Financial stability* merupakan suatu gambaran kondisi stabilitas keuangan perusahaan. Apabila *financial stability* perusahaan mengalami ketidak stabilan maka manajemen menghadapi tekanan untuk melakukan *financial statment fraud* (Skousen:2009). Manajemen seringkali mendapat tekanan untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu mengelola asset dengan baik sehingga menghasilkan laba yang tinggi hingga pada akhirnya menguntungkan investor, alasan inilah yang kemudian mendorong manajemen untuk menggunakan laporan keuangan sebagai alat untuk menutupi kondisi stabilitas perusahaan yang sesungguhnya dengan melakukan *fraud* (Daljono,2013). Penelitian Skousen *et. al.* (2009) menunjukkan hasil bahwa semakin besar rasio perubahan total aset perusahaan maka terdapat kemungkinan dilakukannya tindakan *fraud* pada laporan keuangan. *Financial target* berupa target-target keuangan seperti target capaian laba perusahaan. Target keuangan memiliki hubungan erat dengan agensi teori yang menjelaskan hubungan antara agent dan prinsipal, baik agent maupun prinsipal memiliki harapan untuk memenuhi kepentingan masing-masing, kaitanya dalam hal ini terdapat keinginan manajemen untuk mendapatkan bonus

ataupun insentif atas kinerja mereka apabila terpenuhinya target keuangan (Tessa, G Chintya dan Puji Harto, 2016). Penelitian Carslon dan Bathala (dalam Widyastuti, 2009) menemukan bahwa perusahaan dengan laba yang dinggi (diukur dari probabilitas) lebih mungkin melakukan *fraud* di dalam laporan keuangan.

Variabel *opportunity* diproksikan dengan *ineffective monitoring*. Praktik kecurangan merupakan salah satu dampak dari pengawasan yang lemah sehingga memberi kesempatan kepada agent untuk berperilaku menyimpang dengan melakukan manajemen laba ataupun manipulasi (Andayani, 2010). *Ineffective monitoring* merupakan suatu keadaan yang menggambarkan lemahnya pengawasan kinerja perusahaan (Aprilia, 2017). Lemahnya pengawasan perusahaan menimbulkan celah untuk melakukan kecurangan (Apriyani dan Ritonga, 2019).

Variabel *rationalization* diproksikan dengan *change in auditor*. *Rationalization* merupakan suatu sikap pembenaran seorang atas tindakan kejahatan yang dilakukan. St. Pierre dan Anderson (1984) serta Stice (1991) menjelaskan bahwa *Rationalization* dapat diproksikan dengan perubahan auditor karena ada upaya penghapusan jejak audit mengenai *fraud* yang ditemukan pada audit sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan Loebbecke *et.al* (1998) pada sampel penelitiannya ditemukan hasil bahwa *fraud* dilakukan dalam 2 (dua) tahun awal masa jabatan auditor.

Variable *competance* diproksikan dengan pergantian direksi. *Competance* ialah suatu faktor kualitatif yang menurut Wolfe dan Hermanson salah satu

pelengkap dari model *fraud triangle*. *Competance* juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur seberapa besar kemampuan seseorang untuk dapat melakukan *fraud* dilingkungan perusahaan (Sihombing, 2014). Perubahan atau pergantian direksi mengandung muatan politis sehingga berpotensi memicu terjadinya *conflict of interest*. Wolfe dan Hermanson (2004) sudah melakukan penelitian mengenai kemampuan seseorang sebagai salah satu *fraud risk factor* yang melatarbelakangi terjadinya *financial statment fraud*, dan menyimpulkan bahwa pergantian direksi mengindikasikan terjadinya sebuah kecurangan.

Variabel *arrogance* diproksikan dengan *frequent number of CEO's picture*. Crowe (dalam Yusuf & Simon, 2015) berpendapat *frequent number of CEO's picture* yaitu jumlah penggambaran seorang CEO dalam suatu perusahaan dengan menampilkan *display picture, track record* ataupun prestasi yang dipaparkan berulang dalam laporan keuangan. Seorang CEO cenderung ingin menunjukan kepada publik mengenai capaian karir dan kekuasaan yang dia miliki (Sidiq et, al. ; 2017). *Control internal system* apapun tidak bisa membatasi tindakan dan prilaku seorang CEO karena kekuasaan yang dimiliki, penjelasan ini didukung oleh penelitian Simon *et.al.* (2015) dan Tessa dan Puji (2016) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa *frequent number of CEO's picture* berhubungan dengan arogansi yang berpengaruh dalam tindakan *financial statment fraud*.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan lembaga keuangan non perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019 meliputi lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan efek

dan perusahaan keuangan lain. Pertimbangan memilih lembaga keuangan non perbankan dikarenakan sektor tersebut termasuk dalam sektor keuangan yang rentan terjadi kecurangan.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini berjudul **“Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi pada Lembaga Keuangan Non Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2019”** .

1.2 Rumusan Masalah

Seharusnya laporan keuangan mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, namun salah saji akibat manipulasi masih sering terjadi menyebabkan informasi yang ada didalam laporan keuangan menyesatkan bagi pihak - pihak yang berkepentingan. Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan tujuan melakukan identifikasi keberadaan *fraud*. Terdapat 3 (tiga) teori yang menjadi pedoman dalam melakukan deteksi *fraud* yaitu : *fraud triangle theory* (Cressey; 1953), *fraud diamond theory* (Wolf dan Hermanson,;2004) dan yang terbaru *fraud pentagon theory* (Crowe;2011). Perkembangan teori terbaru dalam pendeteksian *fraud* mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini akan penguji pengaruh 5 (lima) elemen fraud pentagon yaitu tekanan (*preasure*), peluang (*oppourtunity*), rasionalisasi (*rasionalization*), kompetensi (*competance*) dan arogansi (*arogance*) dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *financial target* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada lembaga sektor keuangan non perbankan ?
2. Apakah *financial stability* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada lembaga sektor keuangan non perbankan ?
3. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada lembaga sektor keuangan non perbankan ?
4. Apakah *change in auditor* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada lembaga sektor keuangan non perbankan ?
5. Apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada lembaga sektor keuangan non perbankan ?
6. Apakah *frequent number of CEO's picture* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada lembaga sektor keuangan non perbankan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh *financial target* terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada lembaga sektor keuangan non perbankan.
2. Pengaruh *financial stability* terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada lembaga sektor keuangan non perbankan.
3. Pengaruh *ineffective monitoring* terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada lembaga sektor keuangan non perbankan.

4. Pengaruh *change in auditor* terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada lembaga sektor keuangan non perbankan.
5. Pengaruh pergantian direksi terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada lembaga sektor keuangan non perbankan.
6. Pengaruh *frequent number of CEO's picture* terhadap pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada lembaga sektor keuangan non perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pendeteksian kecurangan dalam pelaporan keuangan, serta dapat menjadi bahan rujukan dan referensi untuk melakukan penelitian berikutnya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi serta menampah pengetahuan masyarakat mengenai cara mendeteksi kecurangan dalam pelaporan keuangan.